

PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Helly Ocktilia

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, helly.ocktilia@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe the practice of community-based social work in dealing with the problem of neglected children in rural communities and efforts to develop local communities in overcoming it. Neglected children are children who are categorized as children who need special protection. Poverty pressures and family economic vulnerabilities often cause the ability to fulfill children's rights to be very limited, including the right to education. The study of community-based social work practices was carried out in one of the rural areas of Sumedang Regency, West Java Province. The method used in writing this study is the study of literature and documents related to the topic of social work, neglected children, and community development. The results of the study show that efforts to address the problem of neglected children who have not fulfilled their educational rights are carried out in a participatory manner with the community using stages of handling macro social work practices ranging from social initiation to termination and referral. The Social Work Method used is Community Development/Community Organization, with the strategies and tactics used: (1) Collaboration with implementation tactics, participation development, and empowerment; (2) Campaign strategies with educational and persuasion tactics. It was concluded that the handling of the problem of neglected children has been carried out in a participatory manner through social assistance by providing capacity building and utilizing community assets so that it can increase the community's self-empowerment in dealing with the problems faced. The neglected children handling program is outlined in the "Smart Children House Program (Rumah Bocah Cerdas)". The goal is to increase literacy movements in the community to increase parental knowledge about the importance of education for children, broaden their horizons and increase children's motivation to go to school and reduce illiteracy rates in children.

Keywords:

Community Development, Neglected Children, Practice of Macro Social Work

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas dalam menangani masalah anak terlantar pendidikan pada masyarakat perdesaan serta upaya pengembangan komunitas lokal dalam mengatasinya. Studi dilakukan di salah satu wilayah perdesaan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi praktik pekerjaan sosial makro. Studi dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan dokumen yang terkait dengan topik pekerjaan sosial, anak terlantar, dan pengembangan masyarakat. Hasil studi menunjukkan upaya penanganan masalah anak terlantar pendidikan dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat dengan menggunakan tahap-tahap penanganan praktek pekerjaan sosial makro mulai dari inisiasi sosial hingga terminasi dan rujukan. Metoda Pekerjaan Sosial yang digunakan dalam pengembangan komunitas yaitu *Community Development/Community Organization*, dengan strategi dan taktik yang digunakan: (1) Kolaborasi dengan taktik implementasi, pengembangan partisipasi dan pemberdayaan; (2) Strategi Kampanye dengan taktik pendidikan dan persuasi. Disimpulkan bahwa penanganan masalah anak terlantar pendidikan telah dilakukan secara partisipatif melalui pendampingan sosial dengan memberikan penguatan kapasitas dan memanfaatkan asset komunitas sehingga dapat meningkatkan keberdayaan komunitas dalam menangani masalah. Program penanganan anak terlantar dituangkan dalam “Program Rumah Bocah Cerdas (Rumah BODAS)”. Tujuannya untuk meningkatkan gerakan literasi pada masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan orangtua tentang pentingnya pendidikan bagi anak, meningkatkan motivasi anak untuk bersekolah, serta menurunkan angka buta huruf pada anak-anak.

Kata kunci:

Anak Terlantar, Pengembangan Masyarakat, Praktik Pekerjaan Sosial Makro

PENDAHULUAN

Praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat lokal merupakan kegiatan intervensi praktik makro berbasis masyarakat yang difokuskan pada komunitas atau populasi masyarakat tertentu untuk tujuan pengembangan, pencegahan atau penanganan permasalahan sosial.

Praktik pekerjaan sosial berbasis masyarakat berhubungan dengan aspek pelayanan sosial komunitas yang memfokuskan pada pendekatan ekologi dalam upaya untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
- c. Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- d. Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal. (Pedoman Praktikum berbasis Komunitas STKS Bandung, 2019).

Ife (2008) mendeskripsikann bahwa semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun masyarakat. Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan

mereka, dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial.

Menurut Netting (2004), tahapan praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) Inisiasi Sosial; 2) Pengorganisasian Sosial; 3)Asesmen sosial; 4) Penyusunan Rencana Intervensi; 5) Pelaksanaan Intervensi; 6) Evaluasi, Terminasi dan Rujukan Sosial.

Salah satu jenis masalah sosial yang cukup mendesak untuk ditangani melalui praktik pekerjaan sosial adalah anak terlantar. Masalah anak terlantar merupakan masalah yang memerlukan penanganan sedini mungkin sebelum mengakibatkan munculnya masalah-masalah lain di kemudian hari, seperti: terhambatnya tumbuh kembang anak, tidak berkembangnya potensi dan bakat anak, anak tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan yang memadai, tidak

terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.. Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya (Bagong Suyanto, 2013; Michael H, 2013).

Beberapa teori yang mendasari pentingnya untuk mengkaji anak dan permasalahannya dikemukakan oleh Santi Anjarsari dan Sri Hartini (2018) dalam penelitiannya tentang upaya mengurangi jumlah anak yang rentan terlantar. Santi dan Sri menjelaskan bahwa anak-anak adalah individu yang terus berkembang hingga mereka mencapai usia dewasa dan matang baik secara fisik maupun mental. Beberapa teori yang mendukung tentang psikologi perkembangan anak, diantaranya teori kognitif, teori kontekstual dan teori perilaku dan belajar sosial.

Dalam teori kognitif, kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental dan dapat membimbing perilaku anak. Menurut teori kognitif Piaget, bagaimana seorang anak dapat beradaptasi serta menginterpretasikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Anaklah yang memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realita lingkungan. Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial. Di dalam teori behaviour (perilaku) lebih ditekankan bahwa kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut B.F Skinner yang merupakan pakar behaviouris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan.

Sedangkan dalam teori belajar sosial yang dikembangkan Albert Bandura dkk, meskipun proses kognitif sangat lah penting namun lingkungan menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan dalam mengendalikan tingkah lakunya sendiri.

Upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak dilakukan melalui kesepakatan antar negara-negara di dunia melalui Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 yang menghasilkan 10 Hak Anak yang harus dipenuhi yaitu: (1) Hak untuk bermain; (2) Hak untuk mendapatkan pendidikan; (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan; (4) Hak untuk mendapatkan nama (identitas); (5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan; (6) Hak untuk mendapatkan makanan; (7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan; (8) Hak untuk mendapatkan rekreasi; (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan; dan (10) Hak untuk berperan dalam pembangunan.

Klaster 4 Konvensi Hak-Hak Anak PBB Pasal 28 ayat 1-3, pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi), dan berkegiatan budaya. Pengertian pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan.

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Semestinya anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam

melindungi hak-haknya. Hak untuk mendapatkan pendidikan menjadi salah satu hak anak yang seringkali terabaikan oleh orang tua atau keluarga anak. Pendidikan, merupakan salah satu kebutuhan anak yang sangat penting, termasuk di dalamnya yaitu pendidikan formal (sekolah). (Sukadi, 2013; Sheilla C.S., 2017).

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, maka pendidikan adalah sasaran utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarginalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka, karena pendidikan memainkan peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. (Meiliani, PS dan Nunung Nurwati, 2018).

Salah satu wilayah yang memiliki data anak putus sekolah cukup tinggi adalah wilayah Provinsi Jawa Barat. Angka putus sekolah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai 37.971 siswa. Angka itu merupakan akumulasi dari angka putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK di Jawa Barat (Adri Zulpianto, 2019).

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki data angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi. BPS Kabupaten Sumedang melakukan penghitungan presentase penduduk usia 7 hingga 24 tahun dan partisipasi sekolah di Kabupaten Sumedang. Hasilnya, pada tahun 2017 presentase masyarakat yang melanjutkan atau masih sekolah sebesar 67,61 persen, dan presentase yang tidak sekolah lagi atau putus sekolah sebesar 32,10 persen, serta 0,28 persen

yang tidak atau belum pernah sekolah. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan hingga tuntas berdasarkan wajib belajar sembilan tahun, data tersebut belum ditambah presentase siswa SMA/SMK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu permasalahan lainnya terkait pendidikan di Sumedang menurut Abdurrohman (2019) adalah angka kesadaran membaca siswa sejak dini yang dinilai masih rendah. Pemerintah sudah mencanangkan Gerakan Literasi untuk menekan angka putus sekolah, namun tanpa dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai di setiap sekolah khususnya di Sumedang. Pada kenyataannya banyak sekolah-sekolah di Sumedang, terutama di daerah terpencil tidak memiliki perpustakaan sekolah yang layak.

Hasil asesmen sosial menunjukkan bahwa permasalahan ini pula yang muncul di Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Desa Cipeuteuy sebagai salah satu desa yang dijadikan sebagai lokasi praktik pekerjaan sosial dalam pengembangan komunitas. Di desa ini terdapat 58 anak dari populasi anak wajib sekolah usia 7-18 tahun yaitu sebanyak 323 anak yang mengalami keterlantaran. 26 anak diantaranya adalah anak yang mengalami putus sekolah, selebihnya adalah anak-anak yang rentan mengalami putus sekolah karena latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarganya yang membuat anak-anak tersebut masuk ke dalam kategori anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan anak yang tidak mendapat pengasuhan dari orang tua (orangtua bercerai, anak lahir di luar pernikahan, anak ditinggal oleh orangtua).

Anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan di Desa Cipeuteuy merupakan masalah yang sudah terjadi secara turun temurun. Selain itu, masih ada pola pikir masyarakat bahwa pendidikan tidak menjadi penting karena untuk menjadi kaya tidak harus bersekolah tetapi cukup dengan bekerja.

Pendekatan penyelesaian masalah anak terlantar pendidikan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Holistic Approach /Comprehensive Approach*, dimana pendekatan ini didasari atas asumsi bahwa setiap masalah yang dihadapi manusia tidak pernah berdiri sendiri atau tunggal, artinya satu masalah selalu terkait dengan masalah lain atau mencakup beberapa aspek/dimensi manusia. Oleh karena itu pemecahan satu masalah harus diikuti dengan pemecahan masalah lain yang terkait secara menyeluruh. Hasil yang diharapkan dari penerapan pendekatan ini akan meningkatkan gerakan literasi pada masyarakat sehingga pengetahuan orangtua tentang pentingnya pendidikan bagi anak meningkat, terbangunnya motivasi anak untuk bersekolah, serta menurunkan angka buta huruf pada anak-anak.

Anak Terlantar

Secara konseptual, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Anak terlantar merupakan anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Istilah anak rawan menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.

Manakala hak-hak anak tidak terpenuhi, dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak memiliki wali dikatakan sebagai anak terlantar. Anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan (Bagong Suyanto, 2013).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”

Negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memelihara, merawat, dan membina fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana tersurat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai program perlindungan kesejahteraan sosial anak terus digulirkan salah satunya yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). PKSA merupakan salah satu program penanganan anak terlantar yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak (Yasmin A.P., Nandang M., dan Risna R., 2015).

PKSA ini meliputi : bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orangtua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Tujuan dari PKSA adalah untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Penerima manfaat program ini diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Terdapat beberapa program kebijakan lainnya yang juga digulirkan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah program BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditugaskan untuk menjalankan program tersebut.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan.. Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta

akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin. KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi. KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.

2. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bentuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.

Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Menurut Ife (2002), komunitas menggambarkan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam

kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama baik yang bersifat fungsional maupun yang memiliki territorial

Kekuatan pengikat suatu komunitas terutama adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya, yang biasanya didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya (Ambar K., 2014).

Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Netting (2001) mengatakan bahwa pekerjaan sosial komunitas merupakan bentuk dari praktik yang dikemas sebagai bentuk intervensi profesional yang diarahkan untuk membawa perubahan terencana (*planned change*) dalam organisasi dan komunitas. Praktik pekerjaan sosial ini didasari oleh berbagai model dan pendekatan, serta beroperasi sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. Glen dalam Budiman Mahmud Mustafa & Jajang Gunawijaya (2015), mengemukakan bahwa secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep intervensi dalam kaitanya dalam praktik komunitas. Model intervensi ini sangat memperhatikan aspek masyarakat dimana didalamnya sangat terasa unsur pendidikan dan upaya mengubah suatu komunitas tersebut.

Sejalan dengan pendapat Netting, Edi Suharto (2010) juga menyatakan bahwa, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara

aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara. Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat berkenaan dengan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Westoby dan Dowling (2013) dalam Ellya Susilowati (2019) menjelaskan bahwa dasar dari pengembangan masyarakat adalah dialog yang dilakukan pada pertemuan masyarakat untuk mendalami, responsif dalam rangka membangun pemahaman, makna, dan tindakan kreatif bersama berkaitan dengan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah model intervensi komunitas baik dipandang sebagai program maupun proses dimana didalam pelaksanaannya terdapat unsur pendidikan, pendampingan serta pengembangan bagi masyarakat tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk penelitian yang objek kajiannya adalah data kepustakaan berupa jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, laporan praktikum, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait

dengan topik pekerjaan sosial, anak terlantar, dan pengembangan masyarakat pada masyarakat perdesaan (Nazir, 2014).

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 1) mendaftar semua variabel yang perlu diteliti; 2) memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber atau referensi yang tersedia; 3) memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti; 4) mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang dapat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti; 5) melakukan *review* dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya melakukan analisis data dengan mengelola data yang sudah diperoleh, hingga mencapai suatu kesimpulan.

Lokus studi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah tempat dilaksanakannya kegiatan praktik pekerjaan sosial berbasis pengembangan masyarakat lokal/komunitas oleh akademisi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan. Pola pikir masyarakat di desa ini tentang pendidikan masih memandang bahwa pendidikan tidak penting, sehingga masih ditemukan 58 anak dari 323 anak yang mengalami keterlantaran pendidikan.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial pengembangan masyarakat lokal dalam penanganan anak terlantar yang tidak memiliki

akses pendidikan di Desa Cipeuteuy dilaksanakan melalui tahap-tahap praktik pekerjaan sosial makro (Netting, 2001; Kristianingsih, 2019), sebagai berikut:

1. Inisiasi Sosial

Inisiasi sosial merupakan kegiatan yang dilakukan agar akademisi dapat diterima di dalam masyarakat sehingga memudahkan akses dalam proses pelaksanaan praktikum.. Inisiasi sosial dilakukan dengan cara melakukan *home visit* yaitu mengunjungi aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat serta menerapkan teknik *Community Involvement* yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian, kerja bakti, rebug warga, dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan *transect walk* di lingkungan Desa Cipeuteuy untuk mengenali kondisi wilayah desa, batas-batas wilayah, serta kondisi keseharian kehidupan masyarakat.

Hasil yang diperoleh dalam tahap inisiasi sosial melalui kegiatan *home visit*, *Community Involvement*, dan *transect walk* adalah sebagai berikut:

1.1. Penerimaan masyarakat yang sangat baik dan hangat. Hal ini dapat terlihat dari seringnya praktikan diundang dalam setiap kegiatan masyarakat maupun di kantor desa. Penerimaan dari masyarakat yang sangat positif memudahkan praktikan dalam menggali setiap informasi yang berkaitan dengan permasalahan, potensi dan sumber yang dimiliki masyarakat.

1.2. Terbangunnya relasi yang baik dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan indikator intensitas relasi yang semakin akrab dengan berbagai elemen masyarakat. Hal ini membantu dan memudahkan dalam melakukan

kerjasama dengan masyarakat karena sudah terbangun rasa saling percaya (*trust building*) antara masyarakat dengan praktikan.

2. Pengorganisasian Sosial

Pengorganisasian sosial merupakan proses mengidentifikasi struktur pengelompokan sosial dan organisasi-organisasi sosial lokal, melibatkan aspek-aspek potensial untuk menggerakkan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi. Kegiatan pengorganisasian sosial dilaksanakan dengan mengunjungi rumah (*home visit*) para tokoh masyarakat seperti Ketua RT dan RW, Kepala Dusun, Bidan Desa, Kader PKK dan pengurus Karang Taruna. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta penyadaran akan berbagai permasalahan sosial yang ada serta membahas alternatif-alternatif penyelesaian masalah dengan menggunakan potensi dan sumber yang ada di Desa Cipeuteuy..

Target yang dicapai dalam tahapan pengorganisasian sosial adalah kesepakatan bersama dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh organisasi serta aparat desa dalam melakukan berbagai kegiatan kerja sama; mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan organisasi lokal yang dapat dijadikan potensi dan sumber dalam menangani permasalahan; mengetahui informasi mengenai organisasi lokal yang dapat dijadikan potensi dan sumber dalam mengatasi permasalahan. Beberapa hal yang telah diperoleh dalam tahap pengorganisasian sosial adalah:

2.1. Teridentifikasinya organisasi sosial lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim serta para pemimpin lokal

di Desa Cipeuteuy sebagai potensi dalam penggerak partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.2. Terlaksananya *focus group discussion* terkait rencana kegiatan atau program yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga yaitu LPM, PKK, dan Karang Taruna

2.3. Pemeriksaan kembali dan melakukan triangulasi data terkait ketepatan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

2.4. Membuat rencana tindak lanjut melalui pertemuan dengan lembaga-lembaga berdasarkan informasi yang telah diperoleh, salah satunya adalah Kader PKK dan pihak LPM.

3. Asesmen Sosial

Asesmen sosial merupakan proses penggalian informasi terkait isu komunitas yang ada di Desa Cipeuteuy. Kegiatan asesmen dilaksanakan dengan media Rembug Warga pada tingkat kampung dan dilanjutkan rembug warga di tingkat desa. Teknologi pekerjaan sosial yang digunakan dalam kegiatan Rembug warga adalah teknologi *Methodology of Participatory/MPA*. Praktikan berperan sebagai fasilitator bagi warga masyarakat dalam menentukan fenomena masalah yang ada di Desa Cipeuteuy.

Berdasarkan hasil rembug warga disepakati bahwa masalah anak terlantar merupakan prioritas masalah yang membutuhkan penanganan sedini mungkin agar tidak menimbulkan masalah lain dikemudian hari. Selain itu dari aspek kuantitas jumlah anak terlantar relatif banyak dibandingkan dengan penyandang masalah sosialnya. Hasil asesmen melalui wawancara, studi dokumentasi maupun asesmen dengan menggunakan MPA

menunjukkan jumlah Anak Terlantar di Desa Cipeuteuy berjumlah 58 anak yang tersebar hampir di setiap RW dan kampung. Persebaran anak terlantar tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Persebaran Anak Terlantar Desa Cipeuteuy Tahun 2019

No	Jenis PMKS	RW 01	RW 02	RW 03	Jumlah
1	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	6	13	4	23
2	Anak Putus Sekolah (tidak mendapat pendidikan) Anak yang tidak mendapat pengasuhan dari orang tua	10	14	2	26
3	(orangtua bercerai, anak lahir diluar pernikahan, anak ditinggal oleh orangtua)	5	1	3	9
Jumlah		21	28	9	58

Sumber : Hasil Asesmen Praktikum Pekerjaan Sosial Makro, Tahun 2019

Merujuk pada tabel 1 maka dapat digambarkan jenis-jenis Anak terlantar yang ada di Desa Cipeuteuy yaitu Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Putus Sekolah atau tidak mendapat pendidikan dan Anak yang tidak mendapat pengasuhan dari orang tua (orangtua bercerai, anak lahir diluar pernikahan, anak ditinggal oleh orangtua). Anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan menempati urutan pertama.

Anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan di Desa Cipeuteuy terjadi karena pola pikir masyarakat yang melihat bahwa pendidikan tidak penting karena untuk menjadi kaya tidak harus bersekolah. Informasi lain disampaikan oleh salah satu informan yang menyebutkan bahwa anak-anak di Desa Cipeuteuy tidak mau bersekolah dengan berbagai alasan seperti tidak adanya biaya serta lokasi sekolah yang jauh dari Desa Cipeuteuy. Untuk lebih jelasnya hasil asesmen terhadap masalah pendidikan anak-anak terlantar di

Desa Cipeuteuy disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Asesmen Sosial tentang Terbatasnya Aksesibilitas Anak pada Pendidikan

Fokus Masalah	Faktor Penyebab	Permasalahan	Kebutuhan
Anak Terlantar	1. Biaya pendidikan tinggi 2. Jarak menuju sekolah jauh	1. Anak tidak mendapatkan pendidikan 2. Rendahnya pengetahuan orangtua tentang pentingnya pendidikan 3. Anak putus sekolah hingga SD/SMP 4. Motivasi anak untuk sekolah rendah 5. Anak tidak bisa membaca dan menulis	1. Penyuluhan berkaitan dengan pentingnya pendidikan bagi orangtua di Desa Cipeuteuy 2. Gerakan literasi masyarakat desa Cipeuteuy 3. Kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung

Sumber: Hasil MPA Warga Desa Cipeuteuy Tahun 2019

Tahap asesmen sosial juga mengidentifikasi Potensi dan Sumber (PSKS) Desa Cipeuteuy yang diperlukan dalam penanganan anak terlantar. Hasil identifikasi PSKS yang memiliki relevansi dengan penanganan anak terlantar disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Desa Cipeuteuy

No.	Jenis PSKS	Jumlah	Keterangan
1.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	25 Orang	Ketua, Kader dan anggota PKK
2.	Karang Taruna Wahana Kesejahteraan Sosial	1 Unit	Ketua, Pengurus, dan anggota
3.	Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3 Unit	Posyandu, PKK dan LPM
4.	Dunia Usaha	6 jenis usaha	Pabrik tusuk sate; Pabrik gula aren; Pengusaha kopi, getah pohon pinus, cengkeh; penggilingan padi

Sumber: Hasil MPA Warga Desa Cipeuteuy, Tahun 2019

4. Rencana Intervensi

Perencanaan dalam praktik pekerjaan sosial pengembangan masyarakat lokal dirumuskan dalam dua tugas yang harus dilaksanakan yaitu perumusan rencana intervensi komunitas dan

membangun komitmen kelompok dalam menyukseskan rencana intervensi komunitas.

a. Perumusan Rencana Intervensi Komunitas

Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan di tingkat komunitas (*community level*) atau masyarakat adalah perencanaan yang bersifat sektoral dan memerlukan advokasi dalam memberi masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan khususnya di tataran lokal

Pada tahapan ini akademisi menggunakan *Technology of Participation* (ToP) sebagai usaha sistematis dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan langkah-langkah kegiatan perencanaan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi (Elison, 1997). Kegiatan perencanaan diikuti sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 8 (delapan) orang *Interest Group* dan 2 (dua) orang *target grup*. *Interest Group* adalah sekelompok warga masyarakat yang memiliki perhatian khusus pada permasalahan anak terlantar dan bersedia untuk berkontribusi dalam upaya penanganannya, terdiri dari: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pengurus lembaga lokal. *Target Group* yaitu perwakilan dari kelompok sasaran terdiri dari orangtua dari anak yang putus sekolah sebanyak 2 (dua) orang. Hasil kegiatan *Technology of Participation* (ToP) dalam perencanaan sosial menghasilkan satu program yang diberi nama: "Program Rumah Bocah Cerdas (BODAS) dalam Penanganan Anak Terlantar" (Kristianingsih, 2019).

1. Tujuan Program

Secara umum tujuan dari program ini yaitu meningkatkan gerakan literasi pada masyarakat Desa Cipeuteuy. Sedangkan secara khusus tujuan dari program ini yaitu untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang pentingnya pendidikan bagi anak.
- b. Memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi anak untuk bersekolah.
- c. Menurunkan angka buta huruf pada anak.

2. Bentuk-Bentuk Kegiatan

Program Rumah Bocah Cerdas (BODAS) di Desa Cipeuteuy ini mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak sehingga tidak lagi terjadi masalah terkait anak tidak mendapatkan hak pendidikan.
- b. Donasi buku untuk pembentukan taman baca Desa Cipeuteuy, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan literasi dalam masyarakat Desa Cipeuteuy dengan meningkatkan minat baca anak-anak dan masyarakat sekitar.
- c. Pembentukan Taman Baca Rumah Bocah Cerdas yang berlokasi di sekitar Kantor Desa Cipeuteuy
- d. Kegiatan Belajar membaca, menulis dan menghitung bagi anak-anak, kegiatan ini dilakukan agar anak-anak Desa Cipeuteuy tidak ada yang buta huruf
- e. Pelatihan seni tari sunda dan seni lukis.

3. Sasaran Program

Sasaran pada program ini adalah orangtua, anak putus sekolah, anak yang masih sekolah.

4. Indikator Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan program Rumah Bocah Cerdas (BODAS) ini adalah masyarakat memiliki semangat gerakan literasi di desa Cipeuteuy. Adapun rinciannya diantaranya :

- a. Masyarakat Desa Cipeuteuy khususnya Orangtua sadar tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dengan indikator: berpartisipasi dalam pelaksanaan intervensi (penyuluhan, penyiapan Rumah BODAS).
- b. Terbentuknya Taman Baca Desa Cipeuteuy sehingga dapat memperluas wawasan dan meningkatkan motivasi anak desa Cipeuteuy untuk bersekolah.

5. Langkah-langkah Pelaksanaan Program

a. Tahap Persiapan

Langkah awal untuk menjalankan program Rumah Bodas adalah menentukan pengurus, dalam pelaksanaannya akademisi menggunakan media rembug warga yang dihadiri TKM dan perwakilan masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan
- 2) Pengumpulan donasi buku
- 3) Pembuatan rak buku
- 4) Pembuatan Taman Baca Desa Cipeuteuy

5) Belajar membaca, menulis dan berhitung bagi anak-anak RW 01 dan RW 02 desa Cipeuteuy.

6) Pelatihan keterampilan seni tari sunda dan seni lukis

c. Tahap Pengakhiran

Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau tidak. Selain itu, tahap ini juga mengidentifikasi ketercapaian program yang telah dilaksanakan dan mengukur bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan program ini.

6. Strategi dan Taktik

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Program Rumah Bodas adalah strategi kolaborasi (*Collaboration*), dengan menggunakan taktik:

- a. Implementasi, yaitu pelaksanaan kerjasama sistem kegiatan (berbagai pihak yang dilibatkan dalam kegiatan) dengan populasi/kelompok sasaran untuk melakukan perubahan untuk memecahkan masalah yang disepakati dengan alokasi dan distribusi sumber.
- b. Pengembangan kapasitas dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan.

7. Sistem Partisipan, terdiri dari:

- a. Inisiator: Masyarakat
- b. Agen Perubahan: Akademisi STKS Bandung
- c. Dukungan Sumber: Pemerintahan Desa, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat
- d. Pengawasan: Masyarakat dan tokoh masyarakat meliputi ketua RW, ketua RT, tokoh agama dan tokoh pemuda.

- e. Sasaran: Orang Tua dan Anak yang tidak mendapat pendidikan
- f. Pelaksana kegiatan: Tim Kerja Masyarakat (TKM)

b. Membangun Komitmen Kelompok

Komitmen kelompok untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana intervensi dilakukan dengan membuat janji hati dari Tim Kerja Masyarakat (TKM). Kegiatan membangun komitmen kelompok dilakukan melalui media rembug warga dengan meminta setiap partisipan untuk mengungkapkan janji hati terhadap kelancaran rencana intervensi. Partisipan menulis kesediaan untuk turut serta berkegiatan dan menjalankan program-program yang akan dilaksanakan dengan mencantumkan tanda tangan sebagai wujud kesungguhan.

5. Intervensi Sosial

Intervensi sosial merupakan tahap dimana rencana intervensi yang sudah dirumuskan dilaksanakan menjadi kegiatan. Terdapat dua kegiatan intervensi yaitu pengembangan masyarakat lokal dan pendampingan sosial.

a. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat lokal merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengembangkan potensi dan sumber yang dimiliki komunitas tersebut baik yang berasal dari dalam maupun luar komunitas tersebut. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Rumah BODAS adalah:

1) Pengumpulan donasi buku.

Pengumpulan donasi buku bertujuan untuk mengumpulkan koleksi buku untuk Taman Baca Desa Cipeuteuy. Buku donasi yang terkumpul cukup banyak melengkapi koleksi

buku, dengan sumber donasi masing-masing dari: warga masyarakat, Rumah Imperum Sumedang sebuah organisasi sosial di Kota Sumedang yang bergerak di bidang sosial dan literasi, dan dari organisasi sosial di Bandung berupa buku *life skill* dengan jumlah 50 buku. Jenis buku-buku ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak Desa Cipeuteuy.

2) Penyuluhan terkait pentingnya pendidikan
Penyuluhan dengan tema “Meningkatkan Masyarakat Peduli Pendidikan” dengan nara sumber Ketua Rumah Imperium Kota Sumedang. Penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Kegiatan diikuti oleh 45 undangan yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Orangtua Anak putus sekolah.

3) Pembuatan Rak Buku

Pembuatan rak buku sebagai tempat untuk menyimpan buku-buku dilakukan oleh praktikan bersama dengan TKM dan Aparat Desa Cipeuteuy. Rak buku ini dibuat dengan menggunakan bambu yang merupakan hasil dari swadaya masyarakat setempat. Rak buku dimanfaatkan untuk tempat buku-buku hasil donasi yang telah terkumpul. Buku-buku hasil donasi ditata rapi sesuai dengan jenisnya dengan penataan yang mempermudah anak-anak untuk mengambil buku-buku tersebut.

4) Pembentukan Taman Baca

Pembentukan Taman Baca Desa Cipeuteuy dilaksanakan setelah proses donasi buku dan pembuatan rak sudah terselesaikan. Lokasi Taman Baca yaitu di salah satu ruangan di samping Kantor Desa yang semula digunakan untuk kegiatan PKK, namun karena PKK sudah memiliki ruangan baru, atas kesepakatan dengan Bapak Kepala Desa maka ruangan ini dimanfaatkan menjadi Taman Baca. Kegiatan

ini dimulai dengan memilah-milah buku sesuai dengan jenisnya oleh TKM dan Aparat Desa Cipeuteuy, sehingga semua buku hasil donasi tertata rapi di Rumah Bodas dan siap untuk dimanfaatkan oleh anak-anak. Taman Baca ini diberi nama sesuai dengan program yang ada yaitu Rumah Bocah Cerdas (BODAS).

5) Belajar bersama bagi anak-anak

Belajar bersama berupa kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung yang dilaksanakan di lokasi Rumah BODAS yaitu di salah satu ruangan Kantor Desa Cipeuteuy. Selain itu, terdapat pula kegiatan lain yaitu pemberian keterampilan dan latihan kesenian. Pada pertemuan awal dihadiri sebanyak 30 anak. Kegiatan ini rutin dilaksanakan 2 (dua) kali setiap minggu yaitu pada hari Jumat dan Minggu.

6. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses penilaian keberhasilan intervensi yang sudah dilaksanakan baik dari segi proses maupun pencapaian hasil. Kegiatan evaluasi bertempat di rumah ketua TKM. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 8 (delapan) orang. Peserta yang hadir meliputi 6 (enam) orang yang merupakan *Interest Group* dan 2 (dua) orang yang merupakan *Target Group*. Kegiatan ini meliputi evaluasi dari setiap rangkaian yang telah dilakukan baik dari awal hingga akhir intervensi. Evaluasi menggunakan sistem skor, sebagai berikut:

1. 1-20 : Tidak Berhasil
2. 21-40 : Kurang Berhasil
3. 41-60 : Cukup Berhasil
4. 61-80 : Berhasil
5. 81-100 : Sangat Berhasil

Evaluasi proses berisi tentang proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh praktikan bersama dengan TKM. Hasil yang diperoleh dari evaluasi, sebagai berikut :

a. Penyuluhan tentang Pentingnya Pendidikan
Hasil yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan ini yaitu memiliki skor 82. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan termasuk kedalam kategori sangat berhasil. TKM turut serta berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini.

b. Pembentukan Taman Baca Desa Cipeuteuy
Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pembentukan Taman Baca Desa Cipeuteuy mendapat skor 82,5. Hasil ini menunjukkan bahwa Pembentukan Taman Baca Desa Cipeuteuy yang dilakukan termasuk kedalam kategori sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat untuk turut serta dalam membuat rak buku. Selain itu, masyarakat juga turut serta berdonasi buku-buku yang mereka miliki.

c. Belajar bersama bagi anak-anak
Hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar bersama bagi anak-anak memiliki skor 84. Hasil ini menunjukkan bahwa Pembinaan bagi anak-anak RW 01 dan RW 02 yang dilakukan termasuk kedalam kategori sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari antusias anak-anak untuk turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga rutin dilaksanakan setiap 2 (dua) kali dalam satu minggu yaitu hari Jumat dan Minggu. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ini juga banyak yaitu 30 anak.

7. Terminasi dan Rujukan

Terminasi dilakukan dengan cara melakukan pengakhiran intervensi kepada komunitas yaitu Tim Kerja Masyarakat. Terminasi dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh aparatur desa, sistem sasaran, dan TKM yang secara partisipatif terlibat dalam rangkaian kegiatan intervensi komunitas. Rujukan dilakukan sebagai upaya menindak lanjuti hasil intervensi yang telah dilakukan oleh praktikan bersama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga terdapat keberlanjutan dari kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan Rujukan dilakukan kepada Kepala Desa Cipeuteuy dan Ketua Rumah BODAS

PEMBAHASAN

Konvensi Hak Anak PBB (1989) dalam Klaster 4 menyebutkan bahwa anak memiliki hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan berkegiatan budaya. Dikaitkan dengan kondisi pada anak-anak terlantar di Desa Cipeuteuy, mereka telah kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan formal maupun informal, dimana dari 58 orang anak terlantar, sejumlah 26 orang anak adalah anak putus sekolah (Kristianingsih, 2019). Hal ini menjadi masalah yang perlu segera mendapat penanganan, karena kondisi ini tidak sesuai dengan klaster 4 Konvensi Hak Anak PBB (1989) yang menyebutkan bahwa anak memiliki hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan berkegiatan budaya. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Imam Sukadi (2013) yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan anak yang sangat penting.

Penanganan persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban moral untuk peduli dan

berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk itu diperlukan upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak terlantar pendidikan di Desa Cipeuteuy dengan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat berbasis komunitas.

Inti dari pengembangan masyarakat menurut Edi Suharto (2010) merupakan proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan melalui pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan. Kegiatan praktik pekerjaan sosial berbasis pengembangan komunitas dalam menangani masalah anak terlantar pendidikan yang dilaksanakan di Desa Cipeuteuy menjadi arena dilaksanakannya proses penguatan masyarakat untuk mendukung terhadap pemberian hak pendidikan bagi anak-anak.

Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas ini dilaksanakan dengan menggunakan tahapan-tahapan praktik pekerjaan sosial makro dari Netting (2004) mulai dari tahap inisiasi sosial hingga terminasi. Kegiatan inisiasi sosial dan pengorganisasian sosial yang telah dilakukan dengan birokrat pemerintahan desa, pengurus lembaga sosial lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda serta para orang tua, telah menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi proses pendidikan terhadap anak-anak terlantar (Edi Suharto, 2010). Dengan adanya melibatkan warga masyarakat, maka warga masyarakat secara bersama menyadari akan adanya masalah, kebutuhan, dan kekuatan komunitas untuk diintervensi dan meng-organisasikan diri untuk menghadapi perubahan yang akan dilakukan.

Tahap asesmen sosial sebagai tahapan selanjutnya, dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan pengungkapan masalah melalui kegiatan pengumpulan dan penganalisaan data. Hasil asesmen menunjukkan bahwa pengetahuan orangtua yang masih rendah tentang pentingnya pendidikan bagi anak merupakan masalah utama yang terjadi di Desa Cipeuteuy. Banyak Orangtua yang tidak memiliki perhatian terhadap pendidikan anak, sehingga mereka membebaskan anak-anaknya sekalipun tidak bersekolah. Anak-anak dibiarkan bekerja pada sektor-sektor informal. Selain itu, banyak pula anak-anak yang hanya berdiam diri di desa Cipeuteuy tanpa memiliki kegiatan positif setiap harinya. Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka kriteria Anak putus sekolah atau tidak mendapat pendidikan di Desa Cipeuteuy, adalah: (1) berusia 5 sampai 18 tahun; (2) anak mendapat pendidikan hingga lulus SD atau SMP; (3) anak berhenti sekolah sebelum tamat sekolah; (4) anak menikah pada usia sekolah; dan (5) anak buta huruf.

Data yang terkumpul dari hasil asesmen selanjutnya disintesakan dalam penyusunan rencana intervensi menjadi suatu model penanganan anak terlantar pendidikan berbasis masyarakat, dengan menekankan dimensi-dimensi vital sebagai berikut: (1) memberikan perhatian khusus terhadap peran-peran yang bisa dilakukan masyarakat dengan keterlibatannya menjadi Tim Kerja Masyarakat (TKM) penanganan anak terlantar pendidikan Desa Cipeuteuy; (2) melakukan identifikasi keberfungsian masyarakat seperti: kekuatan, potensi, keterbatasan, dan kekurangan yang dirasakan masyarakat dalam menangani masalah anak terlantar pendidikan;

(3) memotivasi masyarakat untuk mengatasi masalah anak terlantar pendidikan; (4) menganalisis relevansi faktor lingkungan yang turut mendukung timbulnya masalah anak terlantar pendidikan; dan (5) mengidentifikasi sumber-sumber yang tersedia atau dibutuhkan untuk mengurangi/menghilangkan kesulitan masyarakat dalam menangani masalah anak terlantar pendidikan.

Hasil asesmen sosial dapat mengelaborasi kebutuhan masyarakat, yang dituangkan dalam perencanaan sosial. Tahapan perencanaan sosial dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada guna menentukan model intervensi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Model intervensi yang dirancang dalam penanganan anak terlantar pendidikan di Desa Cipeuteuy adalah dengan membentuk Program Rumah Bocah Cerdas (BODAS). Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan gerakan literasi pada masyarakat Desa Cipeuteuy.

Tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan intervensi sosial yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan proses pengembangan masyarakat. Pelaksanaan ini merupakan aktivitas konkrit yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Rumah Bocah Cerdas dalam komunitas Desa Cipeuteuy termasuk didalamnya dukungan ketersediaan anggaran. Terdapat dua kegiatan intervensi yaitu pengembangan masyarakat lokal dan pendampingan sosial.

Pengembangan masyarakat lokal dilakukan dengan mengakses dan memanfaatkan sistem sumber *official* yaitu tokoh-tokoh formal yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pendidikan, dalam hal ini

yaitu Ketua Rumah Imperium Sumedang Rumah Imperium Sumedang yang bergerak dibidang literasi dan lingkungan menjadi nara sumber dalam kegiatan penyuluhan dan tenaga pengajar di salah satu sekoah yang melatih kegiatan belajar bersama anak-anak. Sedangkan sumber *non official* adalah aparatuer pemerintahan desa, para kader PKK, dan anggota Karang Taruna yang berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Rumah Bodas.

Pendampingan sosial dilakukan dalam proses menjalin relasi sosial antara praktikan dengan masyarakat sekitarnya selama proses intervensi komunitas dilaksanakan, dengan cara memberikan bimbingan dan asistensi teknis kepada masyarakat terutama kelompok penerima manfaat (*target group*) yaitu anak-anak terlantar dan para orang tua yang memiliki anak usia sekolah dan tim kerja masyarakat sebagai pelaksana kegiatan (*interest group*) (Isbandi, 2008; Edi Suharto, 2010).

Evaluasi sebagai proses penilaian keberhasilan intervensi yang sudah dilaksanakan baik dari segi proses maupun pencapaian hasil. Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Dunn (2000) dalam Senoaji Y.R. dan Titik D. (2017). Tahapan evaluasi dilaksanakan dengan cara: (1) Memfasilitasi TKM dalam melakukan pengukuran atau pemberian skor akan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan perubahan; (2) Memfasilitasi TKM dalam melakukan pengukuran atau pemberian skor akan tingkat keberhasilan proses yang telah dijalani. Secara umum hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan pelaksanaan intervensi sosial. Hal ini terlihat dari Partisipasi warga dalam merencanakan dan mengikuti

kegiatan cukup besar, dimana kehadiran dan keaktifan mereka dalam pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan masalah dan pemecahan masalah. Warga masyarakat pun antusias dalam melaksanakan berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan.

Tahap terakhir yang dilakukan dalam praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas ini adalah Terminasi dan Rujukan Sosial. Terminasi adalah tahap pengakhiran intervensi pekerjaan sosial (Miftahul Huda dalam Nurul H. dan Julianto S., 2017). Terminasi dilakukan dengan cara melakukan pengakhiran intervensi kepada komunitas yaitu Tim Kerja Masyarakat. Pengakhiran tersebut dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh aparatuer desa, sistem sasaran, dan TKM yang ikut membantu praktikan dalam serangkaian kegiatan yang telah dilakukan dalam intervensi komunitas dan intervensi kebijakan yang ada di Desa Cipeuteuy. Selanjutnya dilakukan Rujukan sebagai tindak lanjut dari proses pengakhiran yang membutuhkan keberlanjutan intervensi/proses pertolongan yang sudah dilaksanakan. Rujukan dilakukan kepada Kepala Desa Cipeuteuy dan Ketua Rumah BODAS (Bocah Cerdas) untuk melibatkan generasi muda yang lain baik yang tergabung dalam karang taruna atau tidak untuk berperan aktif dalam melanjutkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas pada dasarnya merupakan proses pemberian kekuatan kepada komunitas untuk meningkatkan keberdayaan diri melalui pengembangan masyarakat. Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan masalah anak terlantar pendidikan di Desa

Cipeuteuy telah dilaksanakan dengan tercapainya: 1) Penyadaran masyarakat bahwa asset komunitas merupakan kekuatan kolektif yang dapat digunakan untuk upaya pemecahan masalah anak terlantar pendidikan melalui intervensi komunitas yang terorganisir secara baik; 2) Pengorganisasian Sosial masyarakat untuk saling menghubungkan (*inter-connections*) antar setiap unsur di dalam komunitas untuk menangani masalah anak terlantar; 3) Terbangunnya koalisi sosial dari berbagai kelompok komunitas untuk melakukan advokasi kebijakan dalam rangka perubahan sosial di dalam masyarakat; 4) Keberdayaan diri masyarakat Desa Cipeuteuy dalam menangani masalah anak terlantar pendidikan.

Penanganan masalah anak terlantar pendidikan melalui tahapan-tahapan dalam praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas di Desa Cipeuteuy telah terlaksana dengan menghasilkan satu model penanganan masalah anak terlantar berbasis komunitas yaitu terbentuknya Program Rumah Bocah Cerdas (BODAS). Tujuan program ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan gerakan literasi pada masyarakat khususnya anak-anak di Desa Cipeuteuy. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rumah BODAS yaitu penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, donasi buku untuk pembentukan Taman Baca Desa Cipeuteuy, Pembentukan Taman Baca, dan kegiatan belajar bersama berupa kegiatan belajar membaca, menulis dan berhitung. Selain itu, terdapat pula kegiatan pemberian keterampilan dan latihan kesenian.

Kegiatan-kegiatan di Rumah BODAS dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan literasi dalam masyarakat Desa Cipeuteuy dan

meningkatkan minat belajar membaca, menulis dan menghitung bagi anak-anak. Kegiatan ini dilakukan agar anak-anak desa Cipeuteuy tidak ada yang buta huruf. Kegiatan tersebut sudah terlaksana secara partisipatif bersama dengan masyarakat Desa Cipeuteuy Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Kusumastuti. (2014). *Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Sumedang dalam angka 2018*. Bandung: CV Setia Abadi.
- Bagong Suyanto. (2013). *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Budiman Mahmud Mustafa. (2015). *Strategi Keberhasilan Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Kreativitas Seni Tradisi: Studi Kasus Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat*. SOSIO KOSEPSIA 5 (*Community Development*).
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , (2010). CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era
- Ellya Susilowati. (2019). *Penerapan Teknologi Pengembangan Masyarakat pada Program Desa Sabilulungan*. Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial Vol. 01 No. 1, Juli 2019
- Imam Sukadi. (2013). *Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 5 No. 2
- Ife, Jim. (2002). *Community Development*. Pearson Education Australia Pty Limited

- , Frank Tesoreiro. (2008). *Community Development : Alternatif. Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isbandi Rukminto Adi, (2008). *Intervensi Komunitas, Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: UI Press
- Jurusan Pengembangan Sosial Masyarakat. (2009). *Teknologi Pengembangan Masyarakat 3*. Bandung: STKS Bandung.
- Kristianingsih. (2019). *Penanganan Anak Terlantar melalui Program Rumah Bocah Cerdas di Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang*. Laporan Praktikum III. Bandung: STKS Bandung
- Meiliani, PS., Nunung Nurwati. (2018). *Peran Extended Family Pada Anak TKW yang Terlantar di Kabupaten Indramayu*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vo. 5 No. 2
- Mchael H., H. Mumbunan. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur*. Jurnal Lex et Societes, Vol. I. No. 4 Agustus
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Netting, F. Ellen, Peter M. Kettner dan Steven L. McMurtry.(2004). *Social Work Macro Practice (Third Edition)*. Boston: Allyn and Bacon
- Nurul Husna, Julianto Saleh. (2017). *Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar)*. Jurnal Al-Ijtima'iyah/Vol.4, No.2, Juli– Desember 2017
- Pedoman Praktikum III. (2019). *Praktek Pekerjaan Sosial Makro Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Santi Anjarsari, Sri Hartini. (2018). *Upaya Pengelola Program Penguatan Keluarga Sos Children's Villages Indonesia dalam Mengurangi Jumlah Anak-Anak yang Rentan Terlantar*. Jurnal Comm-Edu Volume 1 Nomor 1, Januari 2018
- Senoaji Yuda Raharjo, Titik Djumiarti. (2017). *Evaluasi Tahapan Intervensi Sosial Pada Kelompok Nelayan Dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Dukuh Tambakrejo Kota Semarang*. Journal of Public Policy and Management. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
- Sheilla Chairunnisyah Sirait. (2017). *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Yasmin A.P., Nandang M., dan Risna R. (2015). *Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Memenuhi Kesejahteraan Anak Jalanan*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol.2 No. 1

Sumber lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Tahun 2005
- Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 34
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Sumber Internet:

- Abdurrohman. (2019). *Refleksi 100 Hari Kerja, PMII Sumedang Minta Pemkab Tuntaskan Persoalan di Sektor Pendidikan*. Warta Jabar. <http://rri.co.id>

Adri Zulpianto, (2019). *Miris, Angka Putus Sekolah di Jawa Barat Capai 37.971 Siswa*. <https://www.timesindonesia.co.id>